

## DAFTAR PUSTAKA

- Blau Peter M & Marshall W. Meyer, (2000) Alih bahasa oleh Slamet Rijanto, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Gifford & Elizabeth Pinchot (1993), *The End of Bureaucracy & The Rise of the Intelligent Organization*, Berrett – Koehler Publishers, San Francisco.
- Lunenburg Ffred C (2012), *Organizational Structure : Mintzberz`s Framework , International Journal Of Scholarly, Academic, Intellectual Diversity, Volume 14, Number 1, 2012*
- Mintzberg, Henry, (1993) *Structure in Five Designing Effective Organizations*, Prentice-Hall, Inc. New Jersey.
- Mulyadi. Dedy, 2015, *Organizatton Design And Job Analysis*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Nirwandar, Sapta, (1998), “Arah Kebijakan Pemerintah Tentang Kelembagaan Otonomi Daerah”, makalah pada Lokakarya Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah, Bandung, 3 Desember 1998.
- Nur Suratman (2013), *Decentralization and Development in Public Policy Implementation Perspective; Case Study in Indonesia, IOSR Journal Of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), Volume 17, Issue 6 (Nov-Dec. 2013) PP 27-33.*
- Osborne David dan Ted Gaebler (1992) berjudul: "Reinventing Government, How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector"
- Osborne David and Peter Plastrik, (1997) *Banishing Bureaucracy The Five Strategies for Reinventing Government.*
- Ron Ashkenas, Dave Ulrich, Todd Jick, Steve Kerr (2002), *The Boundaryless Organization Breaking The Chains of Organizational Structure*, Jhon Willey & Sons Inc.
- Sachroni, Oman, (1998), “Kebijakan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah”, makalah pada Lokakarya *Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah*, Bandung, 3 Desember 1998.

Sedermayanti.Hj, Hidayat Syarifudin, 2002, Metodologi Penelitian, Bandung : Mandar Maju.

Supriyono, Bambang, (2001)*Pertautan Teori Dinas Dan Institusi*, Melalui <http://images.hozinulasrul.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SJavGAoKCBAAF@cPH41/Teori%20Institusi.pdf?nmid=108832919>

Sutarto, 2002, Dasar-Dasar Organisasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Suwandi, Made, *tt*, “Menata Kewenangan Daerah”, Ditjen Otda Jakarta, Melalui <http://www.hubdat.web.id/downloads/rakornis/2005/otonomikewenanganDaerah.pdf>

Winardi. J, 2004, Manajemen Perubahan ( Management Of Change), Bandung : Kencana Prenada Media Group.

Wurtanto. Ig. 2002, Dasar-Dasar Ilmu Organisasi, Yogyakarta : Andi Yogyakarta.

(2010)Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Masyarakat Multikultural, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sistem Pemerintahan Daerah pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

The British Council, (2002) *Public Sector Reform in Britain* Melalui <http://www.britishcouncil.org>.

Sachroni, Oman, (1998), “Kebijaksanaan Pemerintah Tentang Otonomi Daerah”, makalah pada Lokakarya Format Penataan Kelembagaan Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Otonomi Daerah, Bandung, 3 Desember 1998.

Suwandi, Made, *tt*, “Menata Kewenangan Daerah”, Ditjen Otda Jakarta, Melalui <http://www.hubdat.web.id/downloads/rakornis/2005/otonomikewenanganDaerah.pdf>

TumenggungYuswandi A. (2014) *Bureaucracy Reform in Indonesia Devolepment Planning, Journal of New Government Paradigm, Volume 2, 2014.*

UNDP (1996), *Local governance, Report of the United Nations Global Forum on Innovative Policies and Practices in Local Governance, Gothenburg Sweden.*

# LAMPIRAN

---



**Tabel 9**  
**Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 01 Tahun 2015 tentang**  
**Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang**  
**Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat**

No	No perda	Judul	Tanggal penetapan
1	11 tahun 2015	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	09 – 31-2015
2	11 tahun 2015	Sekretariat DPRD	09 – 31-2015
3	23 tahun 2007	Dinas Pekerjaan Umum Daerah	04 – 12-2007
4	23 tahun 2007	Dinas Kesehatan	04 – 12-2007
5	23 tahun 2007	Dinas Pendidikan dan Pengajaran	04 – 12-2007
6	23 tahun 2007	Dinas Pertanian	04 – 12-2007
7	23 tahun 2007	Dinas Perhubungan	04 – 12-2007
8	23 tahun 2007	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	04 – 12-2007
9	23 tahun 2007	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	04 – 12-2007
10	23 tahun 2007	Dinas Koperasi,UKM dan Penanaman Modal	04 – 12-2007
11	23 tahun 2007	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	04 – 12-2007
12	23 tahun 2007	Dinas Perikanan dan Kelautan	04 – 12-2007
13	23 tahun 2007	Dinas Pemuda dan Olahraga	04 – 12-2007
14	23 tahun 2007	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	04 – 12-2007
15	23 tahun 2007	Dinas Pertambangan dan Energi	04 – 12-2007
16	23 tahun 2007	Dinas Peternakan	04 – 12-2007
17	01 tahun 2015	Dinas Pendapatan Daerah	12 – 01-2015
18	23 tahun 2007	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	04 – 12-2007
19	23 tahun 2007	Inspektorat	04 – 12-2007
20	23 tahun 2007	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	04-12-2007
21	23 tahun 2007	Badan kepegawai Daerah	04 – 12-2007
22	01 tahun 2015	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	12 – 01-2015
23	23 tahun 2007	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan	04 – 12-2007
24	23 tahun 2007	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah	04 – 12-2007
25	23 tahun 2007	Badan Lingkungan Hidup	04 – 12-2007
26	01 tahun 2015	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12-01-2015
27	01 tahun 2015	Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan	12 – 01-2015
28	23 tahun 2007	Kantor Parawisata dan Kebudayaan	04 – 12-2007
29	23 tahun 2007	Kantor Sosial	04 – 12-2007
30	23 tahun 2007	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	04 – 12-200
31	23 tahun 2007	Kantor Pelayanan Terpadu	04 – 12-200
32	01 tahun 2015	Kantor Satpol PP dan Linmas	12-01-2015
33		Rumah Sakit Umum Daerah Tanj. Pura	
34		AKKES	

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Langkat tahun 2016

**Tabel 10**  
**Data PNS Tahun 2016 (PP 41/2007)**  
**SKPD dan Formasi Jabatan Struktural Kabupaten Langkat**

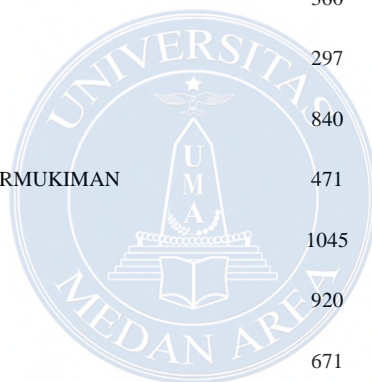
No	Unit kerja	FORMASI JABATAN					JML
		JABATAN STRUKTURAL YANG ADA					
		Esl.IIa	Esl.IIb	Esl.IIIa	Esl.IIIb	Esl.IVa	
1	Sekretariat Daerah	1					1
2	Asisten I, II dan III		3	8	-	27	39
3	Staf Ahli		5	-	-	-	5
4	Sekretariat DPRD		1	1	3	8	13
5	Dinas Pekerjaan Umum Daerah		1	1	4	10	16
6	Dinas Kesehatan		1	1	4	12	18
7	Dinas Pendidikan dan Pengajaran		1	1	4	14	20
8	Dinas Pertanian		1	1	4	14	20
9	Dinas Perhubungan		1	1	4	14	20
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		1	1	4	14	20
11	Dinas Kebersihan dan Pertamanan		1	1	4	10	16
12	Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal Daerah		1	1	4	10	16
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1	1	4	14	20
14	Dinas Perikanan dan Kelautan		1	1	4	14	20
15	Dinas Pemuda dan Olahraga		1	1	3	8	13
16	Dinas Kehutanan dan Perkebunan		1	1	4	10	16
17	Dinas Pertambangan dan Energi		1	1	4	10	16
18	Dinas Peternakan		1	1	4	10	16
19	Dinas Pendapatan Daerah		1	1	4	11	16
20	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		1	1	3	8	13
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1	1	4	10	16
22	Inspektorat		1	1	3	9	14
23	Badan Kepegawaian Daerah		1	1	3	8	13
24	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		1	1	4	10	16
25	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan		1	1	3	8	13
26	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah		1	1	4	10	16
27	Badan Lingkungan Hidup		1	1	4	10	16
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1	-	4	9	14
29	Kantor Kebudayaan dan Pariwisata			1		4	5
30	Kantor Sosial			1		4	5
31	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi			1		4	5
32	Kantor Pelayanan Terpadu			1		4	5
33	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik			1		4	5
34	Kantor Satpol PP			1		6	7
35	Rumah Sakit Umum Daerah			1		6	7
36	Akademi Kesehatan			1	1	6	8
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>33</b>	<b>41</b>	<b>95</b>	<b>330</b>	<b>500</b>

*Sumber:* Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat tahun 2015

**TABEL 11****Skor Urusan Kabupaten Langkat**

NO	URUSAN	SKOR	TIPE DINAS
1	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL	1089	DINAS KABUPATEN /KOTA TIPE A
2	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	280	BUKAN DINAS KABUPATEN/KOTA TERSENDIRI (SETINGKAT SUB BIDANG)
3	INSPEKTORAT	1045	INSPEKTORAT KABUPATEN / KOTA TIPE A
4	KEARSIPAN	780	DINAS KABUPATEN /KOTA TIPE B
5	KEBUDAYAAN	440	DINAS KABUPATEN / KOTA TIPE C
6	KEHUTANAN	200	BUKAN DINAS KABUPATEN/KOTA TERSENDIRI (SETINGKAT SUB BIDANG)
7	KELAUTAN DAN PERIKANAN	880	DINAS KABUPATEN /KOTA TIPE A
8	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN (KAB/KOTA)	682	BADAN KABUPATEN/KOTA TIPE B
9	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	748	DINAS KABUPATEN / KOTA TIPE B
10	KESEHATAN	924	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE A
11	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB KEBAKARAN)	792	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE B
12	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB POL PP)	627	SAT POL PP KAB/KOTA TIPE A
13	KEUANGAN	1100	BADAN KABUPATEN/KOTA TIPE A
14	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	845	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE A
15	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	858	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE A
16	LINGKUNGAN HIDUP	671	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE B
17	PANGAN	858	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE A
18	PARIWISATA	726	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE B
19	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	724	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE B
20	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	829	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE A
21	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	770	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE B
22	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	770	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE B
23	PENDIDIKAN	1100	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE A

NO	URUSAN	SKOR	TIPE DINAS
24	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	748	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
25	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	902	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE A
26	PERDANGANGAN	847	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE A
27	PERENCANAAN	922	BADAN KABUPATEN/KOTA TIPE A
28	PERHUBUNGAN (UNTUK WILAYAH DARATAN)	735	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE B
29	PERHUBUNGAN (UNTUK WILAYAH KEPULAUAN)	640	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE B
30	PERINDUSTRIAN	396	BUKAN DINAS KABUPATEN/KOTA TERSENDIRI (SETINGKAT BIDANG)
31	PERPUSTAKAAN	400	BUKAN DINAS KABUPATEN/KOTA TERSENDIRI (SETINGKAT BIDANG)
32	PERSANDIAN	360	BUKAN DINAS KABUPATEN/KOTA TERSENDIRI (SETINGKAT BIDANG)
33	PERTAHANAN	297	BUKAN DINAS KABUPATEN/KOTA TERSENDIRI (SETINGKAT SUB BIDANG)
34	PERTANIAN	840	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE A
35	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	471	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE C
36	SEKRETARIAT DAERAH	1045	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TIPE A
37	SEKRETARIAT DEWAN	920	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA TIPE A
38	SOSIAL	671	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE B
39	STASTISTIK	396	(SETINGKAT BIDANG)
40	TENAGA KERJA	726	DINAS KABUPATEN/KOTA TIPE B



LAMA

PERHITUNGAN ANGGARAN PEJABAT (PP 41/2007)

No.	Esselon	Jabatan	Jlh Jabatan	Tunjangan jabatan		Jumlah Tunjangan Jabatan (pertahun)	Insentif		Jumlah Insentif (pertahun)
1	II.a	Sekretaris Daerah	1	x 12	3.250.000	39.000.000	x 12	12.000.000	144.000.000
2	II.b	Sekretaris Dewan	1	x 12	2.025.000	24.300.000	x 12	4.500.000	54.000.000
3		Inspektur	1	x 12	2.025.000	24.300.000	x 12	4.500.000	54.000.000
4		Asisten	3	x 12	2.025.000	72.900.000	x 12	8.000.000	288.000.000
5		Staf Ahli	5	x 12	2.025.000	121.500.000	x 12	6.500.000	390.000.000
6		Kepala Dinas/Badan	23	x 12	2.025.000	558.900.000	x 12	4.000.000	1.104.000.000
7	III.a	Kepala Kantor	8	x 12	1.260.000	120.960.000	x 12	3.000.000	288.000.000
8		Kepala Bagian	9	x 12	1.260.000	136.080.000	x 12	3.000.000	324.000.000
9		Sekretaris Dinas/Badan	24	x 12	1.260.000	362.880.000	x 12	2.000.000	576.000.000
10	III.b	Kepala Bidang Dinas/Badan	95	x 12	980.000	1.117.200.000	x 12	1.500.000	1.710.000.000
11	IV.a	Kasubbag Bagian	27	x 12	540.000	174.960.000	x 12	1.000.000	324.000.000
12		Kasubbag / Kasi Dinas Badan	303	x 12	540.000	1.963.440.000	x 12	750.000	2.727.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>500</b>		<b>19.215.000</b>	<b>4.716.420.000</b>		<b>50.750.000</b>	<b>7.983.000.000</b>



## Data Pejabat Struktural sesuai dengan Nomenklatur Baru (PP 18/2016)

No	Unit kerja	FORMASI JABATAN/JABATAN STRUKTURAL YANG ADA					JML	Tipe	
		Esl.IIa	Esl.II.b	Esl.IIIa	Esl.IIIb	Esl.IVa			Esl.IVb
1	SEKRETARIAT DAERAH	1	-	-	-	-	-	1	A
2	SEKRETARIAT DPRD		1	4	-	6		11	A
3	ASISTEN I, II DAN III		3	8	-	23		34	A
4	STAF AHLI		3	-	-	-		3	A
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		1	1	3	11		16	A
6	INSPEKTORAT DAERAH		1	5	3	-		9	A
7	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		1	1	2	6		10	C
8	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		1	1	3	11		16	B
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		1	1	3	8		13	B
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		1	1	3	8		13	B
11	DINAS KESEHATAN		1	1	4	14		20	A
12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		1	1	3	8		13	B
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH		1	1	4	10		16	B
14	BADAN PENDAPATAN DAERAH		1	1	3	8		13	B
15	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		1	1	3	11		16	A
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		1	1	3	11		16	B
17	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		1	1	5	16		23	B
18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		1	1	2	6		10	C
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		1	1	3	11		16	B
20	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1	1	2	7		11	C
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		1	1	4	10		16	B
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU		1	1	3	8		13	B
23	DINAS PENDIDIKAN		1	1	4	15		21	A
24	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK		1	1	4	10		16	A
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1	1	4	15		21	A
26	DINAS PERHUBUNGAN		1	1	3	10		15	B
27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		1	1	3	11		16	A
28	DINAS SOSIAL		1	1	3	8		13	C
29	DINAS KETENAGAKERJAAN		1	1	3	11		16	B
30	DINAS KOPERASI		1	1	3	11		16	B
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		1	1	3	9		14	B
34	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH			1		6		7	A
	<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>34</b>	<b>44</b>	<b>86</b>	<b>299</b>	<b>464</b>	

POLA MAKSIMAL

**PERHITUNGAN ANGGARAN PEJABAT (PP 18/2016)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

No.	Esselon	Jabatan	Jlh	Tunjangan jabatan		Jumlah Tunjangan Jabatan	Insentif		Jumlah Insentif
			Jabatan			(pertahun)			(pertahun)
1	II.a	Sekretaris Daerah	1	x 12	3,250,000	39,000,000	x 12	12,000,000	144,000,000
2	II.b	Sekretaris Dewan	1	x 12	2,025,000	24,300,000	x 12	4,500,000	54,000,000
3		Inspektur	1	x 12	2,025,000	24,300,000	x 12	4,500,000	54,000,000
4		Asisten	3	x 12	2,025,000	72,900,000	x 12	8,000,000	288,000,000
5		Staf Ahli	3	x 12	2,025,000	72,900,000	x 12	6,500,000	234,000,000
6		Kepala Dinas/Badan	26	x 12	2,025,000	607,500,000	x 12	4,000,000	1,248,000,000
						0			
7	III.a	Kepala Kantor	2	x 12	1,260,000	30,240,000	x 12	3,000,000	72,000,000
8		Kepala Bagian	9	x 12	1,260,000	136,080,000	x 12	3,000,000	288,000,000
9		Sekretaris Dinas/Badan	34	x 12	1,260,000	408,240,000	x 12	2,000,000	816,000,000
						0			
10	III.b	Kepala Bidang Dinas/Badan	86	x 12	980,000	987,840,000	x 12	1,500,000	1,548,000,000
						0			
11	IV.a	Kasubbag Bagian	27	x 12	540,000	174,960,000	x 12	1,000,000	324,000,000
12		Kasubbag / Kasi Dinas Badan	272	x 12	540,000	1,918,080,000	x 12	750,000	2,448,000,000
<b>JUMLAH</b>			<b>464</b>	<b>-</b>	<b>19,215,000</b>	<b>4,479,360,000</b>	<b>-</b>	<b>50,750,000</b>	<b>7,518,000,000</b>

